

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Informasi Akurat



UJI COBA PEMBUKAAN OBJEK WISATA ULUWATU BALI



PENJUALAN
PRODUK UMKM
DI DENPASAR
MENINGKAT LEWAT
APLIKASI DIGITAL

Hal. 4



HAL
14

Pemprov Bali: Proyek Jalan Tembus Singaraja-Mengwitani Tetap Berjalan

Pemerintah Provinsi Bali memastikan pembangunan jalan tembus (shortcut) batas Kota Singaraja-Mengwitani untuk titik 7A, 7B, dan 7C, yang dilengkapi delapan titik anjung pandang sebagai salah satu upaya mewujudkan infrastruktur terintegrasi, tetap berjalan.

"Bapak Gubernur berkomitmen untuk menyelesaikan shortcut Singaraja-Mengwitani ini, meski di tengah pandemi," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda di Denpasar, Rabu.

Menurut Nusakti, pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari APBN semuanya masih sesuai dengan rencana, tidak ada yang batal atau dipotong. "Semua akan terus jalan. Pemprov Bali juga telah menuntaskan pembebasan lahannya," ujar Nusakti.

Oleh karena itu, pada Kamis (2/9/2021) di Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng, akan dilakukan peletakan batu pertama dimulainya pembangunan ruas jalan titik 7A, 7B, 7C dengan panjang 601 meter serta titik

8 sepanjang 1.564 meter yang terdiri atas jalan 1.404 meter dan jembatan 160 meter.

"Dengan dilanjutkannya proyek ini diharapkan dapat mengurangi kelokan dan kemiringan jalan. Dengan demikian, strukturnya lebih landai dan mempersingkat waktu perjalanan dari Denpasar ke Singaraja begitu pun sebaliknya," ucapnya.

Nusakti mengatakan pembangunan jalan tembus pada ruas batas Kota Singaraja-Mengwitani ini penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan antara kawasan Bali bagian utara dan selatan, khususnya di sektor pariwisata sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

Latar belakang dibangunnya



Gambar desain jalan tembus batas Singaraja-Mengwitani. ANTARA/HO-Pemprov Bali

shortcut pada titik 7A, 7B dan 7C disebabkan kondisi jalan existing terdapat tikungan pendek dengan jari-jari tikungannya kecil dengan kelandaian lebih dari 10 persen sehingga kecepatan kendaraan hanya 20 kilometer/jam.

"Adapun skema pembiayaan dengan dana APBN murni maupun SBSN dengan rencana biaya digabung dengan SC 8 senilai

Rp145,56 miliar lebih (multi years contract)," katanya.

Pemprov Bali dalam hal ini mengerjakan detail engineering design (DED) serta melakukan pembebasan lahan untuk titik 7A, 7B, 7C, 7D dan 7E serta dan titik 8 dengan luas 11,970 hektare dan biaya pembebasan mencapai Rp83,73 miliar lebih yang saat ini telah tuntas dilakukan. (ant)

Pemprov Bali Apresiasi Kemenkumham Tertibkan WNA Pelanggar Prokes



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati saat menerima audiensi Kakanwil Kemenkumham Jamaruli Manihuruk di Denpasar, Senin (6/9/2021). ANTARA/HO-Pemprov Bali.

PEMERINTAH Provinsi Bali mengapresiasi langkah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM provinsi setempat terkait tindakan penertiban bagi warga negara asing (WNA) yang melanggar protokol kesehatan.

"Kami menyadari memang masih banyak WNA yang melanggar prokes di Bali dan itu bisa

merusak citra Bali yang sedang berupaya menurunkan angka penyebaran COVID-19," kata Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati saat menerima audiensi Kakanwil Kemenkumham Jamaruli Manihuruk di Denpasar, Senin.

Apalagi, ujar dia, Bali yang terakhir ini mendapatkan pujian dari

pemerintah pusat karena berhasil menurunkan angka kasus baru COVID-19 serta angka kematian.

"Pencapaian ini jangan sampai tercoreng karena ulah tidak bertanggung jawab," ucap pria yang biasa disapa Cok Ace itu.

Guru Besar ISI Denpasar itu menambahkan, Satpol PP Pemprov Bali kerap menemukan pelanggaran seperti WNA yang tidak memakai masker di tempat umum bahkan menggelar acara di ruangan tertutup tanpa masker.

Pihaknya telah melakukan tindakan berupa sanksi administratif hingga swab PCR bagi mereka. "Tetapi tentu saja hal tersebut tidak cukup, tindakan lebih keras juga kita lakukan bersama Kanwil Kemenkumham HAM seperti deportasi," katanya.

Mengenai pariwisata Bali, tokoh Puri Ubud yang sekaligus menjabat sebagai Ketua PHRI Bali tersebut

mengatakan pihaknya sedang merancang skema "essential travel".

"Jadi, WNA yang mempunyai visa kerja bisa langsung datang ke Bali. Kami membidik para diplomat negara sahabat dan pengusaha untuk turun ke Bali. Meskipun itu tidak memberikan hasil signifikan, setidaknya bisa menggerakkan hotel-hotel di Bali," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Jamaruli Manihuruk menyampaikan pertemuan tersebut terkait pelaksanaan operasi dari Kanwil Kemenkumham Bali khususnya dari Kantor Imigrasi dalam hal pengawasan dokumen izin tinggal WNA.

Selama ini juga telah dibantu oleh Satpol PP Provinsi Bali dalam pengawasan dan penertiban protokol kesehatan terhadap WNA yang ada di Bali. (ant)

Gubernur: Papan Ketik Aksara Bali Padukan Kearifan Lokal Dengan Iptek

GUBERNUR Bali Wayan Koster mengatakan Papan Ketik (Keyboard) Aksara Bali yang dikembangkan Tim Peneliti Program Studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana merupakan wujud perpaduan kearifan lokal Bali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Perkembangan iptek, khususnya teknologi digital yang global tidak boleh mematikan atau menenggelamkan kebudayaan dan kearifan lokal Bali yang sangat kaya dan unik seperti aksara Bali,” kata Koster dalam keterangan tertulisnya di Denpasar, Minggu.

Sebelumnya, Koster pada Sabtu (11/9) telah meluncurkan Papan Ketik Aksara Bali yang dikembangkan oleh Tim Peneliti Universitas Udayana yakni Cokorda Rai Adi Pramatha, PhD, IB Ary Indra Iswara MKom, I Putu Gede Hendra Suputra, MKom, dan IB Gede Dwidasmara, MCs.

Menurut dia, dengan pengembangan “keyboard” itu, maka

aksara Bali tidak hanya dikenal oleh masyarakat Bali, tetapi akan meluas ke pergaulan masyarakat nasional, bahkan memasuki pergaulan masyarakat dunia.

Ide atau gagasan mengembangkan Papan Ketik Aksara Bali tersebut sekaligus merupakan kelanjutan pelaksanaan kebijakan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

“Tujuannya untuk melindungi keberadaan aksara Bali sebagai warisan adiluhung dari leluhur Bali,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Bali menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para siswa dan mahasiswa, memberikan tujuh soal untuk diketik dalam aksara Bali dan ternyata para siswa dan mahasiswa dengan sigap mampu menuliskan secara benar dan cepat dari laptop masing-masing yang ditayangkan langsung dalam layar virtual.

Sebagai bentuk apresiasi, Guber-



Gubernur Bali Wayan Koster berfoto bersama perwakilan siswa dan mahasiswa serta Kadisdikpora Bali IKN Boy Jayawibawa di Denpasar, Sabtu (11/9/2021). ANTARA/HO-Pemprov Bali.

nur Bali secara spontan memberikan penghargaan berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp1 juta kepada 49 perwakilan siswa dan mahasiswa yang akan dikirim melalui rekening masing-masing.

Keyboard aksara Bali diyakini akan mendunia, karena memiliki tujuh keunggulan fungsi, yakni

menggunakan koneksi WiFi (USB dongle) atau Bluetooth; dapat digunakan untuk menuliskan Aksara Bali secara natural (tanpa auto correction); dan dapat digunakan untuk menuliskan aksara Bali pada sistem operasi yang berbeda seperti Apple MacOS dan Microsoft Windows. (ant)

Sekda: Birokrasi di Bali Telah Berubah Jadi Birokrasi Milenial

SEKRETARIS Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memaparkan berbagai terobosan di bidang reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) pemprov setempat secara virtual kepada tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni birokrasi di Bali telah berubah dari birokrasi konvensional menjadi birokrasi milenial.

“Salah satu terobosan Pemprov Bali dalam reformasi birokrasi adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Wajah birokrasi kami telah berubah dari konvensional menjadi birokrasi milenial,” kata Dewa Indra di Denpasar, Selasa.

Bila diibaratkan metaformosis kupu-kupu, menurut dia, Pemprov Bali saat ini telah melewati proses kepompong dan telah berubah menjadi kupu-kupu yang menge-

pakkan sayap.

“Semangat reformasi birokrasi dan SAKIP sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, tepatnya misi nomor 22 yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah,” ucapnya.



Dalam implementasinya, misi tersebut diimplementasikan melalui penggunaan media digital dalam berbagai sistem layanan publik Pemprov Bali.

Pemprov Bali, tambah dia, telah menggunakan sarana e-office dengan tanda tangan elektronik dalam surat menyurat. “Selain surat keputusan, semua surat menggunakan tanda tangan elektronik,” ucapnya.

Selain itu, Biro Hukum Setprov Bali juga memanfaatkan sistem elektronik dalam tugasnya memfasilitasi penyusunan produk hukum

pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam layanan perizinan, pengadaan barang dan jasa dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Pemprov Bali juga telah menerapkan sistem online dan telah nyaman digunakan oleh masyarakat.

Selain itu, Pemprov Bali juga melakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan arahan serta kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian-RB.

“Pemprov juga menerapkan sistem absensi ‘online’ berbasis GPS yang telah nyaman digunakan oleh pegawai. Penilaian kinerja juga diterapkan secara online melalui aplikasi sikepo,” katanya. (ant)

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat memaparkan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) di Denpasar, Selasa (14/9/2021). ANTARA/HO-Pemprov Bali.

Penjualan Produk UMKM di Denpasar Meningkatkan Lewat Aplikasi Digital

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Bali menyatakan penjualan produk UMKM setempat meningkat lewat pemasaran digital dengan dua aplikasi yakni aplikasi UMKM Bali Bangkit dan aplikasi Makin Dekat.

“Hasilnya, produk UMKM di Denpasar mengalami peningkatan hingga 0.11 persen dan berangsur membaik jika dibandingkan pada Agustus,” ujar Plt Kadis Koperasi dan UMKM Denpasar, I Made Saryawan, di Denpasar, Senin.

Di tengah pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi yang makin terpuruk, katanya, pihaknya terus mengupayakan untuk membangkitkan perekonomian di sektor UMKM.

“Langkah mengatur strategi agar UMKM dan koperasi tetap berjalan pada masa pandemi COVID-19 adalah kami melakukan metode penjualan produk UMKM secara digital dengan dua aplikasi yakni aplikasi



UMKM Bali Bangkit dan aplikasi makin dekat,” katanya.

Dalam transaksi penjualan di dua aplikasi tersebut dengan melibatkan pelaku UMKM dalam memasarkan produknya, strategi ini sukses meningkatkan penjualan dengan berdasarkan adanya daya beli masyarakat yang meningkat.

“Yang paling utama dijual oleh pelaku UMKM dengan cara digital lebih banyak bersifat pangan atau kuliner. Untuk produk lainnya seperti produk kecantikan, sekarang penjualannya belum maksimal, karena era pandemi masih mengutamakan pangan,” tambahnya.

Hingga kini ada 1.000 pelaku



Penjualan produk UMKM setempat meningkat lewat pemasaran digital dengan dua aplikasi yakni aplikasi UMKM Bali Bangkit dan aplikasi makin dekat, hingga mengalami peningkatan hingga 0.11 persen dan berangsur membaik jika dibandingkan pada bulan Agustus. (Antara News Bali/Pande Yudha/2021)

UMKM di Denpasar, Bali, yang bertransaksi lewat kedua aplikasi itu, dengan mengalami peningkatan produk sebesar 0,11 persen.

“Jumlah ini naik dibandingkan bulan lalu yakni, 0 persen dengan kondisi ekonomi

Denpasar sudah mulai bangkit,” katanya.

Pihaknya pun berharap bulan selanjutnya akan semakin membaik dan berangsur normal sehingga roda perekonomian di kota ini bisa kembali menggejalat. (ant)



Wawali Kota Denpasar tinjau rencana pembangunan TPS3R. ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

PEMERINTAH Kota Denpasar, Bali secara gencar membangun TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle) dalam upaya mengatasi masalah sampah dan kebersihan kota.

Wakil Wali Kota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa di sela meninjau rencana pembangunan TPS3R di Kecamatan Denpasar Barat, Rabu, mengatakan pengolahan sampah

dengan metode 3R, yakni Reuse (memanfaatkan kembali), Reduce (mengurangi sampah) dan Recycle (mendaur ulang) akan bermanfaat bagi lingkungan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berpotensi terbukanya lapangan pekerjaan yang baru.

Arya Wibawa mengatakan secara berkelanjutan akan terus memantau pembangunan TPS3R yang dibangun di

Pemkot Denpasar Bangun TPS3R Atasi Sampah

11 lokasi tahun 2021. Dengan langkah pengawasan tersebut, maka jika ada masalah dapat segera ditangani sehingga niat baik pembangunan pengolahan sampah bisa segera terwujud.

“Kami akan kejar pembangunan di tahun ini, sedangkan sisanya kita targetkan dibangun di tahun depan. Dengan pembangunan TPS3R di masing-masing desa dan kelurahan tentunya kami menargetkan tidak ada lagi sampah ke TPA Suwung,” ujarnya.

Sementara Kepala Desa Pemecutan Kelod, I Wayan Tantra mengatakan pembangunan TPS3R di wilayahnya merupakan komitmen bersama di dalam menuntaskan masalah sampah di Kota Denpasar.

“Bantuan kami terima untuk pembangunan TPS3R ini merupakan kehormatan bagi kami selaku kepala desa. Sehingga dengan dibangunnya TPS3R dapat menangani permasalahan sampah, khususnya di wilayah Desa Pemecutan Kelod dan di Denpasar pada umumnya,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan TPS3R tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Sehingga bisa terwujud dan beroperasi awal Januari 2022.

“Target dan rencana kami agar pada tahun 2022 TPS3R bisa beroperasi sehingga permasalahan sampah yang selama ini menjadi beban bisa kita atasi secara bertahap,” katanya. (ant)

Wali Kota Denpasar Tinjau Dua RS Rujukan COVID-19

WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama forkopimda melakukan peninjauan dua rumah sakit rujukan COVID-19, yakni RSUD Wangaya dan RSUP Sanglah Denpasar.



Wali Kota Jaya Negara di Denpasar, Jumat, mengatakan peninjauan sebagai upaya untuk memastikan optimalisasi pelayanan, penanganan kasus terpapar COVID-19 di rumah sakit rujukan, serta keterisian tempat tidur (bad occupancy rate/BOR).

Ia mengatakan dari peninjauan tersebut dapat dipantau bersama bahwa pelayanan di rumah sakit rujukan sudah berjalan dengan optimal serta fokus penurunan BOR juga sudah dilaksanakan.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Dandim 1611/Badung Kolonel Inf Made

Alit Yudana, Wakapolresta Denpasar AKBP I Wayan Jiantana, dan Kasi Intel Kejari Denpasar Eka Suyantha.

"Kunjungan kali ini kita fokus meninjau optimalisasi pelayanan dan BOR, selain itu kami juga sebagai upaya untuk memastikan penanganan kasus-kasus terpapar COVID-19 di rumah sakit rujukan," ucapnya.

Jaya Negara mengatakan dari pemantauan di RSUD Wangaya menyediakan 109 tempat tidur untuk mendukung ketersediaan ruang isolasi COVID-19. Dari jumlah tersebut sebanyak 45 tempat tidur terisi atau 41,28 persen.

Di RSUP Sanglah tersedia sebanyak 289 tempat tidur ruang isolasi COVID-19. Dari jumlah tersebut sebanyak 88 telah terisi atau 30,5 persen.

"Untuk BOR dan pelayanan sudah optimal, sehingga saat ini kita fokus pada penurunan kasus positif



Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara ketika meninjau RS rujukan COVID-19 (ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)

COVID-19, sehingga diharapkan level PPKM untuk Bali, khususnya Kota Denpasar dapat segera turun, serta tentunya dengan harapan kasus menurun dan pasien yang ditangani lekas sembuh," ujarnya.

Dandim 1611/Badung Kolonel Inf Made Alit Yudana meminta rumah sakit rujukan agar memberikan pelayanan secara optimal

sehingga bisa menekan kasus kematian pasien COVID-19.

"Kami minta kepada rumah sakit yang dijadikan tempat rujukan COVID-19 untuk penanganan secara maksimal. Selain berharap dengan penanganan yang baik dari RS tersebut, kepada masyarakat juga menaati protokol kesehatan," ucapnya. (ant)

Tim Gabungan Awasi dan Mendata Warga Asing di Bali



Kesbangpol Denpasar awasi dan data WNA terkait administrasi (ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)

BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar, Bali, melakukan pendataan terhadap warga negara asing atau WNA guna mewujudkan taat administrasi bagi yang menetap dalam jangka waktu lama di Denpasar.

Monitoring dan pengawasan

WNA dengan melibatkan tim gabungan dari unsur Imigrasi, Kepolisian, BIN, Dinas Tenaga Kerja dipimpin Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Kesbangpol Kota Denpasar, Gusti Ngurah Gede Arisudana, Selasa.

Arisudana mengatakan pihaknya terus aktif melakukan

monitoring dan pengawasan terhadap keberadaan WNA di Kota Denpasar. Monitoring diawali dengan melakukan pendataan jumlah WNA di kawasan Kelurahan Sanur.

Ia mengatakan kegiatan ini dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah Indonesia dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

Arisudana menambahkan keberadaan WNA di Kota Denpasar tidak semuanya disiplin mentaati aturan. Untuk itu pengawasan terhadap WNA melibatkan tim terpadu mulai dari Imigrasi, kepolisian, Dinas Pencatatan Sipil, BIN, Dinas Perijinan, Dinas Tenaga Kerja dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pengawasan terhadap WNA

telah dituangkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan telah dituangkan dalam Permendagri dan SK Wali Kota Denpasar. Selain itu juga mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Monitoring WNA di Kota Denpasar diawali dengan mengakuratkan data keberadaan WNA. Adapun pengumpulan data di mulai dari kepala lingkungan kemudian disampaikan ke kelurahan selanjutnya ke Dinas Pencatatan Sipil dan Kesbangpol," ujar Arisudana.

Setelah proses pendataan, kata Arisudana, tim gabungan pengawasan WNA akan kembali turun ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan WNA dimaksud memiliki kelengkapan data yang diperlukan, seperti izin tinggal, baik itu izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. (ant)

Pemkab Badung Terima Bantuan Paket Sembako dari BPD Bali Untuk Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menerima bantuan paket sembako yang akan disalurkan untuk masyarakat dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Mangupura.

"Kami atas nama Pemkab Badung sangat berterimakasih kepada jajaran BPD Bali yang sudah peduli terhadap masyarakat Badung dalam situasi pandemi COVID-19 ini," ujar Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan, pada kesempatan itu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Mangupura membantu masyarakat di Badung dengan bantuan sembako sebanyak 400 paket.

"Tentu bantuan sembako yang diberikan ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat Badung khususnya yang kondisi perekonomiannya terdampak situasi pandemi COVID-19," katanya.

Sekda Adi Arnawa menje-

laskan, bantuan sembako itu selanjutnya diarahkan kepada jajaran Dinas Sosial Badung untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan itu diharapkan dapat berlanjut dengan bantuan-bantuan lainnya seperti bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan diberikan kepada masyarakat Badung yang sedang membutuhkan.

Pemkab Badung juga berterimakasih serta mengapresiasi sejumlah perusahaan dan pihak swasta yang selama ini telah ikut bersama dengan pemerintah dalam membantu meringankan beban masyarakat selama pandemi.

"Mudah-mudahan ke depannya BPD Bali tetap membantu dalam bentuk CSR berupa ban-



Penyerahan bantuan CSR berupa paket sembako dari BPD Bali Cabang Mangupura untuk Pemkab Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

antuan sembako dan bantuan yang lainnya dalam rangka membantu masyarakat di Badung," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPD Bali Cabang Mangupura I Gusti Ngurah Bagus Artawan mengatakan penyerahan sembako dalam rangka PPKM di wilayah Bali itu dilakukan oleh masing-masing cabang BPD Bali dengan memberikan bantuan kepada masyarakat

melalui Dinas Sosial setempat agar distribusi bantuan dapat terarah dan terukur.

"Kami dari Bank BPD Bali Cabang Mangupura berkomitmen untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi di wilayah Badung. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Badung," katanya. (adv)

Badung Majukan Sektor Pertanian Dengan Aplikasi Go-Tani



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa saat kegiatan Sosialisasi Badung Go-Tani. ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, terus melakukan berbagai upaya untuk memajukan sektor pertanian setempat salah satunya dengan menggunakan aplikasi Badung Go-Tani.

"Pemkab Badung sudah membuat aplikasi Go-Tani, setidaknya nantinya ini akan

memudahkan konsumen dalam mengakses produk-produk yang dihasilkan oleh para petani kami di Badung, termasuk juga para petani akan mudah mendapatkan berbagai macam pelayanan," ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Jumat.

Selain mendorong peningkatan kualitas hasil pertanian petani Badung, pihaknya juga akan selalu berupaya dalam memfasilitasi bertemunya produk para petani dengan para konsumen di pasaran.

"Dengan adanya sistem Go-Tani ini nantinya apa yang menjadi persoalan para petani dari segi pemasaran dan akses bisa teratasi," ungkapnya.

Sekda Adi Arnawa juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat dan meminta petani agar dapat termotivasi untuk menjaga kualitas hasil produksi pertanian melalui sistem teknologi informasi.

"Saya berharap dengan adanya aplikasi Go-Tani ini para petani bisa menjadi termotivasi sekaligus percaya diri. Pada mada pandemi COVID-19, sektor pertanian yang sudah memberikan kontribusi terhadap perekonomian

masyarakat," katanya

Ia menambahkan, pihaknya juga telah meminta jajaran Dinas Pertanian agar melakukan pemetaan kebutuhan konsumen, dimana dengan adanya pemetaan kebutuhan konsumen itu nantinya akan disamakan dengan potensi daerah.

"Kami juga mengarahkan para petani agar hasil produksi pertanian menjadi berkualitas, dan berdaya saing. Dinas Pertanian agar tetap berkomitmen serta berpihak kepada para petani guna mensejahterakan para petani kami di wilayah Badung," ujar Sekda Adi Arnawa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung I Wayan Wijana menjelaskan, sejauh ini para petani menghadapi berbagai permasalahan klasik seperti fluktuasi harga, akses pemasaran serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. (adv)

Tim KI Pusat Lakukan Penilaian Informasi Publik di Desa Punggul-Badung

TIM dari Komisi Informasi Pusat bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi dan Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan kunjungan untuk menilai layanan informasi publik di Desa Punggul, Kabupaten Badung, Bali.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari visitasi penilaian keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan di 10 desa yang ada di 10 Provinsi hingga 12 September mendatang.

"Kami menyambut baik pelaksanaan visitasi oleh Komisi Informasi Pusat dalam rangka mendorong tersedianya informasi publik yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Desa dan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas sehingga menghindarkan desa dari budaya tertutup," ujar Bupati Badung Nyoman Giri Prasta di Mangu-pura, Jumat.

Terkait dengan keterbukaan

informasi publik, pihaknya bersama seluruh jajaran di Pemkab Badung selama ini telah melaksanakan komitmen dimana semua aparat berkomitmen menjalankan segala agenda yang dicanangkan pemerintah pusat.

"Kami selalu taat dengan Nawacita Bapak Presiden Joko Widodo berkenaan dengan visi dan misi beliau dan kami implementasikan di Badung dan semoga ini bisa menciptakan sebuah kondisi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat Badung," ungkapnya.

Bupati Giri Prasta mengatakan, kegiatan visitasi Komisi Informasi Pusat tersebut juga diharapkan dapat sesuai dengan realita sehingga nantinya dapat memberikan masukan bagi desa dalam menambah sebuah kesempurnaan di bidang keterbukaan informasi publik.

"Kami tidak akan mengejar juara, walaupun atas berkat Tuhan dan berdasar realitas pe-



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (tengah) saat kegiatan visitasi penilaian keterbukaan informasi publik di Desa Punggul, Badung, Jumat (3/9). ANTARA/HO-Pemkab Badung

nilaian Desa Punggul Badung ini mewakili Bali di tingkat nasional kami juga siap," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menjelaskan, visitasi penilaian keterbukaan publik merupakan bentuk sinergi lembaga negara dalam rangka apresiasi desa.

Menurutnya, tujuan dari pelaksanaan visitasi yang melibatkan empat penilai dari Komisi Informasi Pusat, Kemendes, Bakti Kominfo dan Komisi Informasi Provinsi tersebut adalah karena desa sebagai entitas tersendiri mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. (adv)

Pemkab Badung Dukung BNN Wujudkan Kawasan Bebas Narkoba



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menerima audiensi Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Pol. I Gde Sugianyar beserta jajaran di Rumah Jabatan Bupati Badung, Senin (6/9). ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, siap mendukung upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mewujudkan kawasan yang bebas dari narkoba.

"Salam War on Drug, mari bersama wujudkan kawasan Kabupaten Badung yang bersih dari narkoba," ujar Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta di Mangu-pura, Senin.

Ia mengatakan, Pemkab Badung dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab siap mendukung penuh berbagai program yang dijalankan BNN Pusat, BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten Badung.

Menurutnya, Badan Narkotika Nasional yang dinakhodai oleh

Komjen Petrus Golose dalam menegaskan P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang mewujudkan Indonesia bersih atau bersih narkotika patut diapresiasi.

"Atas nama Pemkab Badung kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan perhatian BNN yang begitu luar biasa dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan mencanangkan program Indonesia bersih narkotika," kata Bupati Giri Prasta.

Pada kesempatan tersebut, Bupati I Nyoman Giri Prasta menerima audiensi Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Pol I Gde Sugianyar bersama Kabid Pemberantasan Putu Agus Arjaya, Kabid P2M AKBP Ketut Suandika dan Plt. Kepala BNN Badung Kompol

AA. Gde Mudita.

Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Pol I Gde Sugianyar menjelaskan, BNN hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat, termasuk masyarakat Badung dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Menurutnya, upaya P4GN yang sejauh ini dilakukan di Badung begitu luar biasa karena dari sisi program itu sejalan dengan program yang dimiliki oleh BNN.

"Kami tahu di Badung ini sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka di Bali bahkan di dunia, yang sangat erat berkaitan dengan masalah narkoba sehingga BNN hadir bersama dengan Pemkab Badung, dalam melindungi dan melayani masyarakat terutama dari aspek pencegahan kemudian pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi," ungkapnya. (adv)

Pemkab Badung Terima Bantuan Beras dari BI Bali

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, menerima bantuan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) berupa empat ton beras dan 100 paket sembako dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

"Kami berterima kasih atas bantuan beras dan sembako yang diberikan Bank Indonesia Perwakilan Bali kepada kami ini. Tentunya ini sangat memberikan manfaat dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat kami saat pandemi COVID-19," Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Selasa.

Bantuan beras dan sembako dari Bank Indonesia tersebut akan segera disalurkan melalui Dinas Sosial Badung kepada masyarakat di Badung yang membutuhkan dan yang kondisi perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19.

"Atas nama masyarakat dan pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan, tentunya hal ini sangat



Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa menerima bantuan beras untuk masyarakat Badung dari Kepala Perwakilan BI Bali, Trisno Nugroho, Senin (6/9/2021). ANTARA/HO-Pemkab Badung

bermanfaat serta secara tidak langsung membantu masyarakat yang terdampak pandemi," katanya

Sekda Adi Arnawa menambahkan, pihaknya berharap perusahaan-perusahaan lain termasuk BUMN dan sektor perbankan juga dapat ikut membantu bersama pemerintah dalam memberi bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

"Semoga bantuan-bantuan tersebut dapat meringankan

bagi beban masyarakat dalam menjalankan kehidupan di tengah pandemi COVID-19 dan nantinya kehidupan bisa kembali seperti sebelumnya seperti sebelum adanya pandemi," ungkap Sekda Adi Arnawa.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Bali Trisno Nugroho menjelaskan, bantuan beras yang diserahkan kepada Pemkab Badung itu merupakan program dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah

Bali (BMPD) dan Bank Indonesia Perwakilan Bali.

Melalui bantuan itu, pihaknya berharap dapat mendukung optimalisasi penanganan COVID-19 dalam upaya pemenuhan pangan masyarakat di Badung.

"Tentu harapan kami dengan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat saat pandemi COVID-19 di Badung, semoga pandemi ini segera berakhir agar kehidupan bisa normal kembali seperti dulu lagi," katanya. (adv)



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Bupati Malaka Provinsi NTT Simon Nahak. ANTARA/HO-Pemkab Badung

ROMBONGAN Pemerintah Kabupaten Malaka, NTT, yang dipimpin Bupati Simon Nahak melakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Badung, Bali, untuk mempelajari sistem peraturan adat yang diterapkan di Badung.

"Kami menjalankan berbagai aturan seperti pakem-pakem, perarem dan awig-awig dari masyarakat setempat dengan local genius yang diimplementasikan dan dijadikan panduan menjadi

aturan dan perundang-undangan yang jelas dan pasti untuk dapat diterima oleh lapisan masyarakat," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Badung, Selasa.

Ia mengatakan, di wilayah Bali terdapat desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta ke-

Pemkab Malaka Pelajari Sistem Adat di Badung

kayaan sendiri, tradisi tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci.

Menurut Sekda Adi Arnawa, desa adat memiliki tugas dan kewenangan serta hak dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, melalui dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak baik Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

Ia menjelaskan, awig-Awig

adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu sedangkan Pararem adalah aturan, keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-awig atau mengatur hal hal baru dan atau menyelesaikan perkara adat/wicara di desa adat.

"Kami juga berharap silaturahmi dengan Pemkab Malaka ini menjadi sebuah awal dari tali persaudaraan yang erat sebagai anak bangsa se-Tanah Air Indonesia," kata Sekda Adi Arnawa.

Sementara itu, Bupati Malaka Simon Nahak menjelaskan, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Badung untuk saling bertukar pikiran tentang kehidupan adat dan mekanismenya yang dijalankan di Badung dan Bali. (adv)

Badung Lepas 86 Atlet Kontingen Bali ke Papua

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, melepas 86 orang atlet, 20 orang pelatih dan sembilan ofisial dari Badung yang akan bergabung bersama kontingen Bali dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.

"Bali datang untuk menang, itu yang betul-betul kami tekankan terutama kepada atlet. Saya juga berpesan agar mereka selalu memegang teguh jiwa sportivitas, ini yang harus dijunjung tinggi," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan, Pemkab Badung sangat memberikan apresiasi atas seluruh bentuk perjuangan atlet Badung yang akan berlaga di 23 cabang olahraga PON Papua dan berharap mereka bisa meraih medali di ajang tersebut.

"Keberangkatan atlet ke Papua sebagai duta Bali di

tingkat nasional. Saya minta mereka dapat berjuang secara maksimal dengan mengedepankan sportivitas dan harus tuntas," katanya.

Bupati Giri Prasta menambahkan, nantinya pihaknya juga akan selalu berkoordinasi dengan Ketua KONI Badung beserta jajarannya untuk memantau perkembangan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON XX Papua.

Mengingat PON XX 2021 Papua diselenggarakan di tengah kondisi pandemi, ia juga mengingatkan seluruh atlet dan ofisial untuk selalu menjaga imun tubuh. Pemkab Badung juga memberikan uang saku sebesar Rp5 juta per orang untuk mereka.

"Saya pastikan sebelum berangkat ke Papua per orang saya berikan uang saku Rp5 juta per orang, itu kebera-



Pelepasan atlet Badung yang akan bergabung dalam kontingen Bali ke PON XX 2021 Papua. ANTARA/HO-Pemkab Badung

nian saya untuk memberikan dukungan kepada kalian semua. Yang penting saya punya anak-anak, saya punya saudara-saudara dan saya punya kontingen sebagai duta Bali," ungkap Bupati Giri Prasta.

Sementara itu, Ketua KONI Badung Made Nariana menjelaskan, sebanyak 115 insan olahraga Badung yang ter-

diri 86 orang atlet, 20 orang pelatih dan sembilan ofisial akan memperkuat Kontingen Bali di PON XX Papua bulan Oktober mendatang.

Tidak hanya mendominasi kontingen, pihaknya berharap nantinya para atlet asal Badung dapat menyumbangkan medali bagi kontingen Provinsi Bali. (adv)

Pemkab Badung Siapkan Aplikasi Pelayanan Publik

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali melakukan soft launching dan menyiapkan sejumlah aplikasi di bidang pelayanan publik.

"Kami berima kasih kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah berinovasi dalam mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, di Mangupura, Selasa.

Ia menjelaskan, sejumlah aplikasi yang disiapkan adalah "Indahnya Terang Bulan" atau Identifikasi Wilayah Pelayanan Tera/Tera Ulang Berkelanjutan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Badung, "Gapura Desa" atau Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera dan

Aman dengan aplikasi Smart Card Reader oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kemudian, aplikasi "Bang Goni" atau Badung Go Tani oleh Dinas Pertanian dan Pangan Badung, "Si Kawan" atau Sistem Informasi Fasilitas Kinerja Dewan oleh Sekretariat DPRD Badung serta "Bares" atau Berbasis Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Dinas Lingkungan-

gan Hidup dan Kebersihan Badung.

Bupati mengatakan, untuk mewujudkan Badung Smart City, maka semua desa yang ada di Badung akan menjadi smart village dan organisasi perangkat daerah juga harus bergerak bersama dengan menggunakan teknologi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, dalam proses pelayanan publik berbasis teknologi informasi, Kominfo Badung adalah rumah besarnya, karena telah memi-

liki jaringan fiber optik sepanjang 150 km dari ujung selatan hingga utara yang menggunakan dana APBD.

Dengan kapasitas jaringan memadai dan mencukupi, maka nanti ke depannya akan dijadikan sebuah program secara holistik yang terintegrasi dari semua lini dan satu komando, kata dia pula.

"Dinas Kominfo akan menjadi leader pertama untuk memberikan semua akses, baik fiber optik maupun servernya. Kami di Kominfo Badung juga sudah memiliki bank data dan server. Kami meyakini semua aplikasi ini akan saling terintegrasi," katanya lagi.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Badung I Made Widiana mengatakan, pihaknya sebagai kepala OPD juga memiliki peran sebagai Agen of Change atau agen-agen perubahan. (adv)



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Lakukan Pengolahan Sampah Terpadu di TPST Samtaku

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bekerja sama dengan PT. Remaja dan PT. Tirta Investama (Aqua Group) membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) "Sampah Tanggung Jawabku" (Samtaku) untuk melakukan pengolahan sampah secara terpadu.

"Ini merupakan tempat pengolahan sampah secara terpadu, sehingga di sini ada pemilahan sampah organik dan non-organik maupun yang lainnya sebagai komitmen dan keberpihakan kami terhadap pengelolaan lingkungan dan pariwisata secara berkelanjutan," kata Bupati Badung Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan dengan adanya sistem pengolahan sampah secara terpadu itu, pihaknya yakin akan mampu menuntaskan dan menyelesaikan permasalahan sampah langsung di sumbernya.

Menurutnya, dengan adanya pengolahan sampah organik di

TPST Samtaku, pemerintah akan membeli olahan sampah organik tersebut untuk didistribusikan kepada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga Badung bisa dicanangkan sebagai "Badung Go Organik".

"Karena prinsipnya hidup ini pilihan dan pilihan itu kita yang tentukan, dengan Badung Go Organik ini maka akan jadi sebuah pertimbangan antara Badung selatan dan Badung utara. Karena sektor pariwisata akan didukung sepenuhnya oleh sektor pertanian," katanya.

Bupati menjelaskan pemilihan sampah yang dilakukan di TPST Samtaku itu dilakukan seperti dengan sampah plastik dipilah ada plastik berwarna ada plastik tidak berwarna pemilahan botol plastik maupun botol kaleng kemudian sampah residu dan organiknya sudah bisa diolah di TPST itu.

"Ini merupakan sebuah role model. Prinsip kami di Badung



Bupati Badung, Provinsi Bali I Nyoman Giri Prasta (kiri) meninjau kegiatan operasional pengolahan sampah TPST Samtaku di Jimbaran Kuta Selatan, Kamis (9/9/2021). (FOTO ANTARA/Naufal Fikri Yusuf)

adalah kami tidak akan pernah berfikir untuk membuang sampah karena itu sama artinya memindahkan masalah kami kepada orang lain," katanya.

Ia menambahkan pengolahan sampah di TPST Samtaku juga tidak menimbulkan bau, sehingga nantinya layak dijadikan sebagai

tempat edukasi bagi para siswa maupun masyarakat umum.

"Kami yakin kalau ini bisa berjalan secara berkelanjutan, daerah lain yang ada di Bali di Indonesia maupun negara lain akan melakukan studi komparasi kesini," kata Nyoman Giri Prasta. (adv)

Bupati Badung Terima Penghargaan BNN



Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Reinhard Golose (tengah) menyerahkan penghargaan kepada Bupati Giri Prasta (kanan) disaksikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (kiri). ANTARA/HO-Pemkab Badung

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta menerima penghargaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) atas peran aktif dalam upaya program P4GN dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Kami selalu mengimplementasikan kebijakan dari BNN Pusat seperti Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose yang mengatakan 'War On Drug' bagaimana Indonesia bisa Bersinar atau Bersih dari Narkotika,"

ujar Bupati Giri Prasta dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Bali, Sabtu.

Ia mengatakan, sebagai salah satu wujud komitmen penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemkab Badung akan menyediakan tempat yang layak untuk rehabilitasi para penyalahguna narkotika.

"BNN ini tidak ada istilah menangkap para pecandu narkoba tetapi memberi edukasi kepada korban. Demi mendukung Badan Narkotika Nasional ini kami di Badung akan secepatnya menyiapkan gedung rehabilitasi yang layak," katanya.

Bupati Giri Prasta juga mengapresiasi kerja sama yang dijalin BNN RI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkotika khususnya di kalangan perempuan dan anak sebagai upaya akselerasi program

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Menurut Bupati Giri Prasta, kerja sama itu akan bisa memberikan edukasi bagi penyalahguna narkotika termasuk masyarakat yang ada di Bali.

"Karena apabila kita terkena narkotika ataupun zat adiktif lainnya ini maka yang terganggu itu adalah fisik, mental dan emosional," ungkapnya.

Kepala BNN Pusat Komjen Petrus Reinhard Golose menjelaskan, tingkat penyalahgunaan atau keterlibatan baik sebagai kurir maupun penyalahguna narkotika oleh anak di bawah usia 15 tahun dan juga yang usia 15-19 tahun termasuk tinggi di tingkat nasional maupun provinsi Bali.

"Kami harus mengurangi dan mengeliminir benar-benar Bali untuk program 'Bersih Narkoba', ini yang kita akan lakukan bersama-sama," ujarnya. (adv)

Forkopimda Gianyar Sidak ke Rumah Sakit Pastikan Data Pasien COVID-19 Akurat

FORUM Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gianyar, Bali, inspeksi mendadak (sidak) ke dua rumah sakit swasta menindaklanjuti arahan Koordinator PPKM Jawa/Bali/Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait data pasien COVID-19.

Siaran pers Diskominfo Gianyar di Gianyar, Jumat, menyebutkan Sekda Kabupaten Gianyar, Made Gede Wisnu Wijaya didampingi Kadis Kesehatan Ida Komang Upeksa tiba di RS Ari Canti, langsung menuju loket.

Sekda menanyakan keberadaan penanggung jawab penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit swasta yang berada di Desa Mas, Kecamatan Ubud. Rombongan forkopimda pun diterima Wadir Penunjang RS Ari Canti.

Forkopimda yang terdiri dari Sekda Pemkab Gianyar, Kapolres dan Dandim memastikan data pasien COVID-19 tidak diper-

ainkan.

"Hari ini kami mengecek dua rumah sakit swasta besar di Gianyar, Ari Canti dan Ganesha. Ini sesuai arahan Pak Luhut (Koordinator PPKM Jawa Bali/Menko Kemaritiman) yang menyangsikan data," ujar Sekda.

Sekda telah mengikuti rapat bersama Luhut pada Selasa (7/8) malam. Dengan kegigihan Gianyar melakukan vaksinasi dan isolasi terpusat (Isoter) setidaknya Gianyar berupaya masuk level II. Namun hingga kini, masih berada di level IV.

"Beliau (Luhut) prediksi paling tidak ada di level II. Vaksin sudah bagus, isoter bagus. Kenapa data (pasien) banyak? Makanya saya ditugaskan oleh pak bupati. Bukan Gianyar saja begini, seluruhnya, Denpasar juga," ungkapnya.

Sekda Gianyar sesuai dengan arahan WHO, terkait kesembuhan pasien paling tidak lima hari sudah sembuh. "Jangan sampai



Forkopimda Gianyar sidak ke rumah sakit pastikan data pasien COVID-19 akurat (Foto Humas Gianyar)

nanti ada indikasi, pasien lewat batas waktu 10 hari ditahan. Itu paling besar rawat pasien, yang lain kan kecil. Artinya kita patut praduga, coba lihat kenyataan di lapangan," jelasnya.

Kedatangan bersama Forkopimda sebagai gerak cepat penanganan COVID-19. "Kapolres ikut. Kalau ditemukan (penyimpangan) Kapolres langsung

telusuri," tegasnya.

Dari sidak ke dua rumah sakit tersebut, Sekda Wisnu Wijaya mengatakan perbandingan data dan kenyataan lapangan sama. Terkait lamanya pasien rawat inap, akan ditelusuri lagi apakah memang pasien memiliki penyakit penyerta sehingga perlu dirawat lebih lama. (ant)

DTW Tanah Lot Bali Wajibkan Wisatawan Akses Pedulilindungi



Proses persiapan pembukaan DTW Tanah Lot, Kabupaten Tabanan Bali, Sabtu (11/09/2021). ANTARA/HO-Polres Tabanan

DAERAH Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot, Kabupaten Tabanan, Bali mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi wisatawan.

"Setiap pengunjung yang

datang wajib melakukan scanning QR Code aplikasi Pedulilindungi yang telah disiapkan di setiap pintu masuk, dengan tujuan untuk mengendalikan kapasitas pengunjung yang diperbolehkan

berkunjung pada satu area tempat wisata," kata Kapolres Tabanan AKBP Ranefli Dian dalam siaran pers yang diterima di Denpasar, Bali, Minggu.

Ia mengatakan bahwa penggunaan aplikasi tersebut juga berguna untuk memastikan para pengunjung yang datang sudah divaksin dan bebas dari COVID-19. Dengan harapan saat meninggalkan objek wisata agar melakukan sign out, sehingga pengunjung lainnya dapat memasuki area wisata.

Kapolres mengatakan bahwa pemerintah daerah setempat, bersama TNI Polri sudah berkoordinasi dengan pengelola DTW dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 agar melakukan pengawasan proses yang ketat terhadap setiap pengunjung.

"Lakukan pencegahan jangan sampai ada kerumunan

baik ditempat terbuka maupun restoran atau tempat tertutup lainnya. Petugas jaga pintu masuk agar menegur dengan humanis bagi para pengunjung yang tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksinasi. Sosialisasikan terus tentang proses melalui publik address kepada masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Polres Tabanan juga melakukan operasi yustisi dengan menasar Daerah Tujuan Wisata di Wilayah Kecamatan Baturiti.

Pemeriksaan pertama di DTW Kebun Raya Eka Karya Bali Bedugul, kemudian bergerak ke DTW Ulun Danu Beratan selanjutnya di DTW The Silas dan The Blooms Garden, semua fasilitas Protokol Kesehatan di masing-masing DTW kesiapan dan kelengkapannya diperiksa petugas. (ant)

BI Bali Dorong TPID Klungkung Percepat Inovasi Pangan dan Digitalisasi

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Klungkung untuk mempercepat inovasi pengolahan komoditas pangan yang kerap menjadi pemicu inflasi, sekaligus digitalisasi pembayaran dan pemasarannya.

“Misalnya saja inovasi untuk pengolahan cabai. Di Bali selama ini kami lihat harga cabai itu naik turun terlalu ekstrem,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho di Kantor Bupati Klungkung, di Semarapura, Jumat.

Trisno menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi Strategi Penyusunan Program Unggulan TPID Award 2022 yang juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan jajaran TPID Kabupaten Klungkung.

Menurut dia, Kabupaten Klungkung dengan berbagai

potensi unggulan yang dimiliki, sudah harus disiapkan mulai sekarang agar matang berkompetisi dalam ajang TPID Award 2022, bersaing dengan TPID lainnya di Tanah Air.

“Yang dinilai dalam ajang itu menyangkut proses dan outputnya. Dalam penilaian proses, diantaranya agar mendapatkan nilai tinggi, haruslah rapat-rapat TPID dihadiri langsung oleh kepala daerah,” ucapnya.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menambahkan, sebelumnya TPID setempat sudah memiliki program yang disebut dengan Beli Mahal Jual Murah yang juga sempat masuk dalam penilaian TPID Award.

Melalui program tersebut, KUD membeli gabah dari petani dengan harga yang lebih tinggi agar petani bisa mendapatkan untung, kemudian menjual kepada konsumen dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.

“Dengan program ini harga



Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho bersama Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Klungkung, Semarapura, Jumat (3/9/2021). ANTARA/Rhisma.

beras di Klungkung menjadi paling stabil. Bahkan kami juga telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM dan BRI untuk KUD yang mengerjakan program tersebut,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga

tengah merancang digitalisasi untuk 11 destinasi wisata yang ada di Nusa Penida. Dengan aplikasi ini nantinya, wisatawan hanya membayar ketika memang menikmati destinasi wisata, bukan hanya ketika baru masuk Nusa Penida. (ant)

Keramba Ikan di Danau Batur Harus Ditata Agar Tidak Rusak Pariwisata



Keramba ikan nila di danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali (Adi Lazuardi)

KERAMBA ikan nila di Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali perlu ditata atau dilakukan zonasi agar tidak kumuh yang merusak keindahan danau dan Gunung Batur yang merugikan sektor pariwisata yang berada di pesisir danau, demikian usul para pengelola wisata dan ketua kelompok nelayan ikan Nila.

“Kementerian Pariwisata, Pemda Bali dan Pemkab Bangli perlu turun tangan agar penataan keramba ikan di danau bisa berjalan. Keberadaan keramba yang tidak tertata mengganggu pemandangan dan mengusik wisatawan yang menikmati keindahan danau dan Gunung Batur, ketika berlibur ke Kintamani,” kata seorang pengelola resort

yang enggan disebutkan namanya, di Kintamani, Bangli, Jumat.

Sumber itu menjelaskan, pemerintah perlu menata keramba ikan, “tempatkan keramba ikan itu di pesisir danau yang memang tidak ada objek wisata, sehingga wisatawan yang sedang berlibur dapat menikmati pemandangan indah danau dan gunung Batur, tanpa terusik oleh keramba ikan yang tampaknya kumuh dan tidak tertata.”

“Kementerian pariwisata, Dinas Pariwisata Bali dan Pemkab Bangli harus ikut turun tangan bersama dengan Dinas Pertanian karena penataan Danau Batur itu harus melibatkan mereka semua. Sebaiknya penataan di Danau Batur itu didanai oleh Kementerian Pariwisata dan Pemprov Bali,” ujar sumber itu.

Seandainya Danau Batur tertata rapi maka akan ada kegiatan pariwisata, misalkan

wisatawan dapat kasih makan ikan nila di keramba dan mancung ikan, katanya.

Danau Batur adalah sumber air bagi sektor pertanian dan pariwisata untuk empat kabupaten yakni Kabupaten Gianyar, Karangasem, Klungkung dan Bangli.

“Jika danau Batur terkontaminasi, kering airnya, maka akan mematikan sektor pertanian dan pariwisata di empat kabupaten tersebut. Banyak destinasi wisata di Gianyar, Karangasem, Klungkung, dan Bangli yang menjual hasil pertanian, sawah dan sungai,” tambah dia.

Ketua kelompok petani ikan nila di desa Buah, Kabupaten Bangli Jero Agus Jambe juga menyatakan setuju upaya penataan keramba ikan di Danau Batur agar sektor pertanian dan pariwisata bisa berjalan seiringan, tanpa harus saling merugikan. (ant)

Bupati Karangasem Letakkan Batu Pertama Pembangunan SMPN 6 Abang

BUPATI Karangasem, I Gede Dana meletakkan batu pertama pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Abang di lahan aset Provinsi Bali seluas 10.000 meter persegi atau 1 hektare.

Bupati Gede Dana mengatakan pembangunan gedung sekolah tersebut berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai antara Pemprov Bali dengan Pemkab Karangasem berlokasi di Desa Tista, Kecamatan Abang.

Menurut Gede Dana, pembangunan SMPN 6 sebagai jawaban atas permohonan dan sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat di Kecamatan Abang dalam memenuhi kebutuhan anak-anak untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMP, terutama SMP negeri.

Pembangunan gedung SMPN 6 Abang dengan dua gedung lantai 2 berisikan 12 ruang kelas, 2 gedung toilet (kamar kecil) dan pagar penyengker ini baru masuk pembangunan tahap I dengan



Bupati Gede Dana peletakkan batu pertama pembangunan SMPN 6 Abang (ANTARA/HO-Humas Pemkab Karangasem)

nilai total pagu anggaran sebesar Rp4,5 miliar dengan sumber dana APBD tahun 2021. Diharapkan dapat difungsikan untuk proses belajar mengajar pada semester 2 tahun ajaran 2021-2022

“Semoga di tahun ajaran baru berikutnya, dengan selesainya pembangunan sekolah ini, diakhir tahun 2021, penerimaan peserta didik baru tidak lagi mengalami kesulitan seperti tahun sebelumnya.

Sehingga anak-anak menjadi tambah semangat untuk melanjutkan sekolah dengan jarak cukup dekat dengan tempat tinggalnya,” kata Bupati Gede Dana.

Gede Dana berharap, SMPN 6 Abang usai dibangun dan diresmikan akan berkembang pesat. Terlebih, lahan SMPN 6 Abang terletak di tengah-tengah wilayah Kecamatan Abang dan dekat dengan jalan utama Karangasem-Singaraja

serta disekitar sekolah telah dibangun Puskesmas Abang dan SMA Negeri 1 Abang.

“Dengan berdirinya gedung ini, saya berharap kepada satuan pendidik, fokus mendidik anak didik, karena Pemerintah telah berusaha menyiapkan sarana dengan baik. Anak didik kita adalah aset Sumber Daya Manusia yang mendukung kemajuan daerah dalam bersaing dengan Kabupaten lain,” ujarnya. **(ant)**

Kakao Jembrana Tembus Pasar Jepang



Petugas memeriksa kakao yang dihasilkan petani di Jembrana, Bali, yang akan diekspor. ANTARA/HO- Karantina Pertanian Denpasar

KAKAO yang merupakan salah satu komoditas unggulan yang dimiliki Kabupaten Jembrana, Bali, berhasil memperluas pangsa pasar ekspornya ke wilayah Asia Timur, yaitu ke wilayah Jepang.

“Ini sesuatu yang sangat

menggemblakan karena di tengah situasi pandemi COVID-19, para petani kakao organik di Jembrana mampu menembus pasar ekspor Jepang,” ujar Kepala Karantina Pertanian Denpasar, I Putu Terunanegara di Kota Den-

pasar, Kamis.

Ia mengatakan, komoditas kakao yang diekspor ke Jepang tersebut merupakan kakao yang dihasilkan para petani kakao di bawah binaan Koperasi Kerta Semaya Jembrana.

“Selama masa pandemi COVID-19 ini, mereka masih mampu melakukan ekspor kakao ke Belgia, dan saat ini luar biasanya bisa menembus pasar Jepang sehingga diharapkan benar-benar hal ini akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali dari sektor pertanian,” katanya.

Putu Terunanegara menjelaskan, untuk memastikan kualitas kakao yang akan diekspor ke Jepang, pejabat Karantina Pertanian Denpasar beberapa waktu yang lalu telah melakukan pemeriksaan terhadap dua ton kakao asal Jembrana dengan nilai ekspor Rp140 juta.

Ekspor komoditas kakao

dalam jumlah besar itu dilakukan setelah sebelumnya beberapa kali contoh kakao organik hasil petani di Jembrana dikirim ke Jepang.

Menurut Putu Terunanegara, komoditas kakao asal Jembrana mempunyai keunggulan tersendiri karena para petani melakukan pengolahan pascapanen sedikit berbeda melalui teknik fermentasi.

Selain Jepang, pasar kakao Jembrana sebelumnya juga sudah menembus pasar Jerman, Amerika Serikat, Austria, Maroko, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, dan Belgia.

“Di masa pandemi saat ini, dari data Iqfast, ekspor komoditas kakao dari Jembrana sudah mencapai 5,3 ton. Dengan adanya berbagai ekspor komoditas pertanian dari Bali, kami berharap ini dapat mendongkrak roda ekonomi dan menarik minat kalangan muda untuk terjun ke bidang pertanian,” ujar Putu Terunanegara. **(ant)**

Bupati Buleleng Raih "Top Pembina BUMD" Ketiga Kalinya

BUPATI Buleleng, Bali Putu Agus Suradnyana meraih penghargaan sebagai TOP Pembina BUMD untuk ketigakalinya, sedangkan Perumda Tirta Hita Buleleng meraih TOP BUMD untuk keempat kalinya pada tahun 2021.

Saat menyerahkan tropi penghargaan itu kepada Bupati di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Senin, Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Hita I Made Lestariana mengatakan penghargaan tingkat nasional itu diselenggarakan oleh Majalah Top Business.

"Seleksi dilakukan terhadap 1.100 BUMD seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, muncul 200 BUMD terbaik yang masuk nominasi berdasarkan rekomendasi dari pihak asosiasi dan berbagai jalur," katanya.

Selanjutnya, sebanyak 170 BUMD mengikuti penilaian oleh juri yang terdiri dari sepuluh guru besar dan berbagai lembaga bisnis. Akhirnya dinobatkan 160 BUMD untuk menerima penghargaan

terbaik.

"Saya sendiri menerima penghargaan itu di Jakarta pada Jumat (10/9/2021) lalu," kata Lestariana.

Selain penghargaan untuk Bupati dan Perumda, I Made Lestariana juga meraih penghargaan TOP CEO BUMD untuk kedua kalinya tahun ini. Seluruh plakat dan piagam penghargaan tersebut diserahkan Lestariana kepada Bupati di Rumah Jabatan Bupati Buleleng.

Dalam kesempatan itu, Agus Suradnyana menjelaskan penghargaan ini menunjukkan konsistensi kinerja dari Perumda Tirta Hita Buleleng sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Perumda Tirta Hita bisa mempertahankan apa yang diraih di tahun-tahun sebelumnya. Artinya, perusahaan daerah ini sehat. Sehat dalam hal kinerja dan juga keuangan.

"Perusahaan bisa berjalan dengan baik, karena itu diganjar dengan penghargaan ini. Top



Bupati Buleleng, Bali Putu Agus Suradnyana meraih penghargaan sebagai TOP Pembina BUMD untuk ketigakalinya, sedangkan Perumda Tirta Hita Buleleng meraih TOP BUMD untuk keempat kalinya pada tahun 2021. Tropi penghargaan itu diserahkan oleh Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Hita I Made Lestariana kepada Bupati di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Senin (13/9/2021). (Antara News Bali/Made Adnyana/2021)

BUMD, Top Pembina, dan Top CEO. Jadi, dirutnya dapat, perusahaannya dapat, pembinanya dapat," jelasnya.

Ia mengungkapkan ada berbagai arahan yang ia berikan kepada Perumda Tirta Hita utamanya di masa pandemi COVID-19 ini. Berbagai Langkah harus dilaku-

kan oleh Perumda Tirta Hita agar perusahaan tetap sehat di masa pandemi.

Salah satunya adalah efisiensi. Segala kegiatan yang sifatnya di manajemen agar lebih efisien. Dengan begitu, tidak membebani masyarakat. (ant)

Pengelola DTW Uluwatu Lakukan Uji Coba Pembukaan Objek Wisata



Wisatawan berkeliling menikmati suasana saat hari pertama uji coba pembukaan Daya Tarik Wisata (DTW) Uluwatu, Badung, Bali, Senin (13/9/2021). Objek wisata yang baru dibuka pada Senin (13/9) tersebut menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat memasuki kawasan wisata itu. (Antara News Bali/Nyoman Hendra/2021)

PENGELOLA Daerah Tujuan Wisata (DTW) Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali, mulai melakukan uji coba pembukaan perdana dengan menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk scan QR Code sertifikat vaksin COVID-19 saat memasuki kawasan wisata itu

pada Senin.

Untuk mendukung program pemerintah terkait 3T yakni Tracing, Testing dan Treatment dalam pembukaan perdana objek wisata itu selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pihak pengelola mengingatkan kepada pengunjung agar

selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk aplikasi PeduliLindungi.

"Yang penting adalah penerapan PeduliLindungi, karena aplikasi ini untuk menjalankan Program 3T testing, tracing dan treatment dan sangat penting bagi pengunjung," kata Manager Pengelola Objek Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu I Wayan Wijana.

Pada pembukaan perdana ini, pihaknya menargetkan jumlah kunjungan di atas 100 orang dan meyakini ke depan jumlah kunjungan akan terus membaik bila kondisi pandemi juga sudah mulai membaik. Selain itu pihaknya berencana membuka pementasan tari kecak yang dimulai pada akhir September 2021.

"Untuk target kunjungan awal, kami menargetkan sebanyak ratusan pengunjung sehari karena DTW ini baru mulai buka," katanya.

Kalau kondisi sudah membaik,

ia meyakini kunjungan wisatawan ke Uluwatu akan bisa terus meningkat yakni di atas 1.000 orang per hari.

Pada hari pertama pembukaan DTW tersebut, kunjungan didominasi oleh wisatawan domestik dan adapula beberapa Warga Negara Asing (WNA) yang sementara waktu menetap di Bali.

"Saya sangat senang bisa jalan-jalan lagi ke objek wisata ini, terakhir ke sini tahun 2019 lalu sebelum pandemi COVID-19," kata wisatawan domestik asal Makassar, Putri Marina.

Gubernur Bali Wayan Koster mengizinkan DTW alam, budaya, spiritual dan desa wisata di Pulau Bali untuk mulai melakukan uji coba pembukaan kawasan bagi wisatawan dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta mengimplementasikan aplikasi PeduliLindungi. (ant)

Rektor Undiksha: Guru Harus Adaptif Karena Didik Generasi Digital

REKTOR Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Buleleng, Bali Prof Dr I Nyoman Jampel menyatakan guru harus adaptif karena peserta didik era sekarang adalah generasi digital.

“PPG menjadi ruang bagi para guru untuk mengasah kompetensi maupun mengembangkan model-model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan,” katanya dalam sambutan pada acara orientasi akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahap IV/Tahun 2021 di Undiksha Singaraja, Selasa.

Di hadapan peserta PPG tahap ke-IV dengan jumlah peserta 493 orang, ia menjelaskan hal penting dalam PPG ini adalah menghasilkan guru yang profesional dan unggul. “Saya sependapat dengan hal itu, karena untuk bisa menciptakan SDM unggul dimulai dengan guru yang unggul,” ucapnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, tugas guru adalah mampu mewujudkan proses belajar yang menyenangkan dan adaptif. “Nah, hal itulah

yang menjadi kunci dalam menghasilkan generasi unggul. Unggul itu kompeten, menguasai ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan, menguasai teknologi, tetapi juga harus ada karakter yang terbangun,” katanya.

Rektor yang pernah menjabat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksha ini menambahkan Undiksha terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program PPG agar semakin baik dan luarannya semakin berkualitas.

Sementara itu, Koordinator PPG Undiksha, Drs. I Gede Nurjaya, M.Pd., dalam laporan kegiatan orientasi akademik mengatakan jumlah peserta PPG di Undiksha ini tergolong tinggi untuk tingkat nasional.

“PPG tahap empat ini tahapan tambahan untuk memfasilitasi guru-guru yang sudah lulus seleksi PPG pada tahun 2019-2020, namun belum tercover pada kegiatan PPG yang sudah terlaksana,” kata Nurjaya.



Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Singaraja, Buleleng, Bali, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., dalam sambutan pada Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahap IV/Tahun 2021 di Undiksha, Singaraja, Selasa (14/9/2021). (Antara News Bali/Made Adnyana/2021)

Menurut Nurjaya, peserta tersebut terdiri atas delapan bidang studi, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD), Geografi, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Bali, dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.

Peserta tidak hanya berasal dari Bali, tetapi juga dari luar Bali, yang secara keseluruhan terdiri atas 232 kabupaten/kota. “Untuk jumlah kelas, tahap ini yang paling banyak, ada 15 kelas. Keragaman asal peserta ini juga semakin menunjukkan Undiksha sebagai pelangi Nusantara,” katanya. (ant)

Bawaslu Buleleng Gandeng STAHN Mpu Kuturan Dukung Pengawasan Partisipatif



Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Putu Sugi Ardana dan Ketua STAHN Mpu Kuturan Singaraja Dr Gede Suwindia menunjukkan MoU kerja sama yang ditandatangani di Singaraja, Buleleng, Senin (13/9/2021). ANTARA/HO-Bawaslu Buleleng.

BADAN Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng menggandeng Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja agar mendukung program pengawasan partisipatif

untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas.

“Penandatanganan kerja sama ini bertujuan agar bisa melibatkan peran serta adik-adik mahasiswa, sebelum pemilu, saat

pemilu dan setelah pemilu guna mendukung program kerja kami,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Putu Sugi Ardana di Singaraja, Senin.

Penandatanganan MoU kerja sama antara Ketua Bawaslu Buleleng dengan Ketua STAHN Mpu Kuturan Singaraja Dr Gede Suwindia bertempat di ruang pertemuan kampus setempat.

Kerja sama yang dijalin tersebut meliputi ruang lingkup pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Sekarang dengan penandatanganan ini menjadi kesempatan kita untuk mengajak STAHN Mpu Kuturan untuk ikut serta melakukan pengawasan partisipatif menyongsong Pemilu Serentak 2024,” ujar Sugi Ardana.

Sementara itu, Ketua Sekolah

Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Dr Gede Suwindia mengatakan perguruan tinggi sebagai miniatur masyarakat, memiliki peran untuk bisa mengajak seluruh komponen di lingkungan perguruan tinggi agar sukseskan pelaksanaan pesta demokrasi.

“Ini menjadi misi besar dan cita-cita mulia kami. Dengan MoU ini secara hukum kami punya payung untuk berbagai kerja sama kita kedepan dalam mendukung program Bawaslu,” ujar Suwindia.

Pihaknya menginginkan agar para mahasiswa terlibat dalam kegiatan-kegiatan riil di lapangan, sehingga tidak menjadi menara gading yang hanya mampu berteori.

“Dengan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Bawaslu Kabupaten Buleleng akan menambah kompetensi mahasiswa,” kata Suwindia. (ant)

BI Bali: Pertanian 4.0 Penting Percepat Pemulihan Ekonomi

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan upaya mendorong sektor pertanian melalui digitalisasi pertanian (pertanian 4.0) menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi serta mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Potensi pengembangan sektor pertanian Bali dan Nusa Tenggara ke depan sesungguhnya masih sangat besar. Namun, sejumlah tantangan dari aspek produksi, kelembagaan, dan pemasaran masih menghadang,” kata Trisno dalam Webinar bertema Transformasi Ekonomi: Balinusra Menuju Pertanian 4.0 di Denpasar, Selasa.

Trisno mengemukakan, komoditas pertanian yang menjadi penopang ekspor untuk Bali dan Nusa Tenggara seperti buah-buahan, kopi, kakao, tanaman obat. Sedangkan untuk produk kelautan seperti kepiting, udang, ikan tuna, mutiara dan rumput laut.

Di NTB dan NTT, lapangan usaha pertanian menjadi penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan

pangsa masing-masing 23 persen dan 29 persen pada 2020. Sementara itu, di Bali, lapangan usaha pertanian memiliki pangsa 15 persen terhadap PDRB.

Trisno menambahkan, di Bali sebanyak 23 persen penduduk bekerja di sektor pertanian, sedangkan di NTB dan NTT, pekerja di sektor pertanian masing-masing sebesar 35 persen dan 54 persen.

“Saat ini, sektor pertanian memiliki peranan yang lebih penting yaitu menyerap tenaga kerja dari sektor industri dan sektor jasa yang kehilangan pekerjaan akibat terkena dampak pandemi COVID-19,” ucapnya.

Terkait pengembangan pertanian dari aspek faktor produksi ini, pertama dihadapkan pada teknologi produksi masih rendah dengan ka-



Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dalam acara Webinar Transformasi Ekonomi: Balinusra Menuju Pertanian 4.0, Selasa (14/9/2021). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

pasitas SDM yang terbatas sehingga produktivitas dan nilai tambah pengolahan komoditas belum optimal.

Kedua, dari aspek kelembagaan, peran kelompok tani juga masih belum optimal baik dari hulu seperti pengawasan praktik bertani yang baik, maupun sisi hilir seperti implementasi korporatisasi petani untuk mencapai

skala ekonomi, mendapat pembiayaan, dan pasar yang lebih pasti.

Ketiga, aspek pemasaran, yaitu tantangan menuju perdagangan luar negeri (ekspor) yang mencakup hambatan tarif berupa pajak ekspor maupun non tarif seperti persyaratan atau sertifikasi dan lain sebagainya yang dikenakan oleh negara pasar. (ant)



PLN UID Bali kunjungi pelanggan serangkaian Hari Pelanggan Nasional (ANTARA/HO-Humas PLN Bali)

PLN UID Bali melakukan kunjungan ke sejumlah pelanggan dalam serangkaian menyambut Hari Pelanggan Nasional pada 4 September 2021, antara lain RSUD Bali Mandara, RSUD Mangunsada Badung, dan PT Samabayu Mandala (Samator Gas),

General Manager PLN UID Bali, I Wayan Udayana di Denpasar, Jumat, mengatakan kunjungan tersebut untuk meningkatkan hubungan, sekaligus

mendengarkan suara pelanggan secara langsung terkait pelayanan yang diberikan oleh PLN.

Pada kunjungannya ke RSUD Bali Mandara, GM PLN UID Bali, I Wayan Udayana yang diterima Pelaksana Tugas Direktur RSUD Bali Mandara, dr. Ketut Suarjaya MPPM, yang menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PLN dalam memasok listrik rumah sakit.

“Kami berharap tenaga

PLN UID Bali Kunjungi Pelanggan di Hari Pelanggan Nasional

kesehatan tetap semangat dalam melaksanakan tugas di masa pandemi COVID-19, dan tidak perlu mengkhawatirkan pasokan listrik, kami pastikan andal, sehingga mampu mendukung pelayanan rumah sakit,” ucap Udayana.

Udayana juga menegaskan bahwa personel PLN akan siaga 24 jam dan siap untuk dihubungi jika rumah sakit menemui kendala kelistrikan.

Ketut Suarjaya menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif yang dilakukan PLN untuk menyapa langsung pelanggan.

Ia juga mengatakan bahwa rumah sakit bersama PLN sama-sama telah membantu masyarakat yang membutuhkan perawatan medis. Hal ini karena

seluruh peralatan rumah sakit ini menggunakan listrik, sehingga pasokan listrik menjadi penting dalam memberikan pelayanan medis bagi masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur RSUD Mangunsada Badung dr. Ketut Japa, MM, dan Manager Area PT Samabayu Mandala (Samator Gas), Masrin.

“Kami berterima kasih kepada PLN karena selama ini telah banyak membantu kami soal suplay listrik secara baik dan andal,” kata Masrin.

Selain melakukan kunjungan kepada pelanggan, untuk merayakan Hari Pelanggan Nasional, PLN juga kembali memperpanjang Promo Super Merdeka Listrik hingga 30 September 2021. (ant)